

Pemprov Kalbar Gandeng Untan

Targetkan Wajar Tanpa Pengecualian

PONTIANAK, TRIBUN - Kalbar memiliki itikad baik bagaimana memperbaiki tata kelola keuangan. Hal tersebut dikatakan Kepala Sub Audit I BPK RI perwakilan Kalbar, Hernold Ferry Makawimbang, saat ditemui dalam Rakor Inspektorat se-Kalimantan Barat tahun 2011 yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Kamis, (3/3).

Satu di antara cara yang ditempuh Pemprov Kalbar adalah bekerjasama dengan Universitas Tanjungpura. Nantinya sejumlah pegawai Pemprov Kalbar maupun Pemkab dan Pemprov akan dikuliahkan maupun short course di

” Untuk mencapai wajar tanpa pengecualian itu tidak bisa lemah di satu di antara unsurnya, harus kuat, harus ada investasi, SDM-nya juga harus profesional dan cermat. ”

HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG

Kasub Audit I BPK RI Perwakilan Kalbar

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Untan.

Hernold menyambut baik dengan adanya program akuntansi yang diselenggarakan di Universitas Tanjungpura tahun ini. Sebab secara tidak langsung, Pemda bisa memanfaatkannya untuk mendidik putra putri

daerahnya disiapkan secara profesional. ”Upaya ini bisa untuk mendapatkan tenaga akuntan yang bagus. Sehingga diharapkan sistemnya nanti bisa berjalan sesuai yang diharapkan,” imbuhnya.

Dalam pertemuan yang bertema *Strategi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Menuju Opini WTP*, Hernold mengatakan forum tersebut terutama untuk menyusun

■ Bersambung ke Hal 15

Pemprov Kalbar Gandeng Untan

strategi mengenai bagaimana memperoleh dan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Apa itu opini wajar tanpa pengecualian? Yakni laporan keuangan disajikan secara wajar, yang artinya tidak ada kesalahan yang material dan telah mengikuti sesuai dengan standar yang sudah disyaratkan untuk laporan keuangan pemerintah sehingga dapat diandalkan penggunaannya dalam rangka pengambilan keputusan.

Untuk mencapai target tersebut, Hernold mengatakan perlunya memperbaiki tata kelola keuangan yang ada dengan memenuhi sejumlah unsur pendukungnya. Oleh karenanya pihaknya menghadirkan seorang perwakilan dari BPK RI untuk memberikan pemahaman dan masukan me-

ngenai bagaimana agar tata kelola keuangan di Kalbar bisa memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. ”Untuk memenuhi target WTP, kita undang Rizal Jalil, seorang anggota BPK RI untuk memberikan arahan agar Kalbar bisa memperoleh opini wajar tanpa pengecualian,” terangnya.

Adapun sejumlah unsur yang harus dipenuhi adalah SDM, sistemnya, kemudian monitoring atau pengendalian. Ketiga unsur ini harus bisa diperbaiki secara sinergis agar tidak menjadi timpang. ”Untuk mencapai wajar tanpa pengecualian itu tidak bisa lemah di satu di antara unsurnya, harus kuat, harus ada investasi, SDM-nya juga harus profesional dan cermat,” lanjutnya.

Sementara itu terkait 13 entitas dari sejumlah kabupaten

yang belum menyampaikan laporan keuangannya, pihak BPK akan memeriksa pada tahap berikutnya.

Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo, memberikan batas waktu 30 hari kepada pemerintah kabupaten/kota di Kalbar untuk memperbaiki laporan keuangan negara terkait rekomendasi yang dikeluarkan badan

tersebut. ”Kalau dalam batas waktu selama 30 hari merambat, pemerintah kabupaten/kota tidak memperbaiki itu maka akan kami serahkan pada penagak hukum,” katanya.

Hingga kini tindak lanjut rekomendasi BPK RI yang sesuai oleh pemerintah daerah masih sedikit yakni 47 persen dari 43 rekomendasi dari tahun 2009 sampai semester II 2010. (gal)

Sambungan Hal.